

## Partisipasi Masyarakat Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sebagai Percepatan Pembangunan Desa Di Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo

### People's Participation In Accountability Managing Fund As Accelerated Development Tuban Village, Gondangrejo Subdistrict

Nindita Pramuktisari<sup>1</sup>, Widyantoro Yuliatmojo<sup>2</sup>

Administrasi Negara<sup>1</sup>, Universitas Surakarta<sup>2</sup>

[pramuktisari17@gmail.com](mailto:pramuktisari17@gmail.com), [dyantara.atmaja@gmail.com](mailto:dyantara.atmaja@gmail.com)

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana masyarakat umum terlibat dalam Pengelolaan Dana Desa sebagai sarana percepatan pembangunan desa. Pendekatannya mengandalkan analisis kualitatif naratif, dan masukan dari kepala desa dan warga masyarakat juga diperhatikan. Temuan studi yang akan dilakukan akan menunjukkan bahwa warga Desa Tuban memiliki motivasi yang kuat untuk berkontribusi pada pertumbuhan Dana Desa dengan memastikan proses pembangunan berjalan lancar. Tidak hanya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, atau pemantauan, tetapi juga, dan ini lebih penting lagi, karena kesadaran warga untuk terlibat dalam menciptakan desa adalah solusi untuk mempercepat proses pembangunan desa, warga desa didorong untuk ikut berpartisipasi.

kata kunci: partisipasi rakyat, Alokasi Dana, pembangunan desa.

#### Abstract

This study's objective is to get an understanding of the ways in which the general public engaged in the Pengelolaan Dana Desa as a means of accelerating the building of desas. The approach relies on naratif qualitative analysis, and the input of the ketua desa and the people is also considered. The findings of the study that is going to be carried out will show that the residents of Desa Tuban have a strong motivation to contribute to the growth of Dana Desa by ensuring that the building process goes off without a hitch. Not only in terms of planning, execution, or monitoring, but also, and this is more important, since people awareness to be involve in creating village is a solution to slow down the process of constructing a desa, the villagers are encouraged to participate in the creation of the desa.

**key phrases: community participation, managing of fund, village improvement.**

## PENDAHULUAN

Saat ini belum ada keseimbangan yang sehat antara pertumbuhan kawasan pedesaan dan kawasan metropolitan. Akibatnya, lebih banyak orang yang ingin pindah ke daerah perkotaan dengan harapan menemukan prospek ekonomi yang lebih besar di sana daripada tertarik untuk tinggal di daerah pedesaan. Hal ini mengakibatkan sejumlah besar kecemasan, terutama sehubungan dengan memburuknya masalah kimia. Pemerintah telah merancang rencana untuk mengurangi kemacetan pembangunan nasional dengan berkonsentrasi pada revitalisasi pedesaan untuk mengatasi masalah ini. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan.

Berdasarkan Undang-Undang perihal desa no. 6 Tahun 2014, yang menekankan pentingnya kemampuan desa untuk melakukan pembangunan dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga melalui standar kualitas rakyat yang lebih tinggi dari rata-rata untuk berkontribusi pada peningkatan kesehatan kesejahteraan penduduk. Selain itu, diharapkan pemerintahan desa yang ada akan lebih mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan

---

sumber daya, keuangan, dan potensi desa. Masyarakat dapat memberikan umpan balik kepada Pemerintah Desa dan bertindak sebagai pengawasan atas dana yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memanfaatkan banyaknya tugas yang dimiliki kepala desa.

Mengamati pentingnya keterlibatan warga sebagai faktor kunci dalam menentukan tingkat otonomi yang dicapai oleh pemerintah daerah. Konsekuensinya, praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah mutlak harus berpegang pada prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, itikad baik, supremasi hukum, efisiensi, dan ekonomi.

Waluyo (2007) menjabarkan bahwasanya akuntabilitas merupakan tanggung jawab penduduk yg bermakna seluruh tahap pengolahan aturan harus benar-benar-sungguh bisa dipertanggungjawabkan, yakni semua kegiatan yang dikerjakan sang aparat pemerintah.

Pengelolaan dana desa pula galat satu bagian dari tata pemerintahan desa yang baik (*good governance*), dimana salah satu pilar pengelolaan keuangan desa, yaitu akuntabilitas. Dana desa dibutuhkan dapat menyampaikan dampak yang baik buat kesejahteraan warga desa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Permendagri nomer 20 tahun 2018 membagikan terdapat 6 (enam) komponen dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dengan mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dalam konteks perencanaan pembangunan pedesaan, masyarakat pedesaan seringkali menolak untuk diikutsertakan dalam musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Dalam konteks ini, musrenbangdes merupakan akronim dari musyawarah perencanaan pembangunan desa. Mayoritas penduduk pedesaan harus mampu mengenali dan mengevaluasi potensi besar yang belum terealisasi yang ada di wilayah mereka agar Undang-Undang Desa Wacana tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik. Pembangunan infrastruktur pedesaan yang optimal dapat membantu penduduk pedesaan menemukan solusi atas kesulitan yang mereka hadapi. Karena ini, kompetensi pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan daerah dapat dirancang untuk lebih mencakup semua dan inklusif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan. Harus ada anggaran untuk mengelola uang yang disediakan untuk mendukung berbagai bentuk dan tujuan pembangunan pedesaan, dan harus ada anggaran. Berdasarkan pada urian terkait hal tersebut, maka rumusan masalah yang dijabarkan berupa, apakah kompetensi pemerintah desa berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa? Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? Dan Apakah Partisipasi masyarakat mempengaruhi akselerasi pembangunan desa? Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisa pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana sekaligus menguji akselerasi pembangunan desa, maka kami akan mengangkat permasalahan dari partisipasi masyarakat desa Tuban dan memosisikan diri sebagai pengamat dari berjalannya pembangunan di Desa Tuban yang sudah berjalan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sehingga mendeskripsikan dan menjelaskan secara rinci mengenai transformasi pembangunan di Desa Tuban dalam mewujudkan desa mandiri. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan kriteria, sedangkan dalam hal pengambilan informan menggunakan teknik purposive yang meliputi Staf Kesejahteraan Sosial Kecamatan

---

Gondangrejo Sekretaris Desa Tuban dan Kepala Desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan dalam analisis data mencakup tiga kegiatan yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti **“Partisipasi Masyarakat Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sebagai Akselerasi Pembangunan Desa Di Desa Tuban Kecamatan Karanganyar”**

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Partisipasi warga**

Partisipasi adalah Wazir (1999) menggambarkan partisipasi murni dalam interaksi sosial yang terjadi dalam setting tertentu. Di sisi lain, “proses evaluasi perubahan yang terjadi melalui keterlibatan anggota masyarakat” adalah bagaimana Muslimin (2012) mendefinisikan “partisipasi masyarakat”. Partisipasi dalam masyarakat memerlukan kegiatan seperti membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan peluang penduduk lokal, memilih solusi yang layak dari kumpulan opsi, dan menerapkan opsi tersebut ke dalam tindakan. Dalam bukunya Naimah (2017), Conyers membuat perbedaan antara dua bentuk partisipasi warga negara yang berbeda: Pertama, ada masalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan, yang memerlukan identifikasi bagaimana individu dapat berkolaborasi secara efektif satu sama lain untuk memastikan arah dan arah yang berkelanjutan. pertumbuhan bangsanya. kedua, partisipasi dalam pelaksanaan rencana yang sebenarnya. Partisipasi ini berfungsi sebagai contoh bagaimana anggota komunitas dapat bekerja sama untuk memastikan keberhasilan suatu program. Kelima, partisipasi dalam proses memutuskan bagaimana sumber daya harus didistribusikan. Dari segi kualitas, seperti peningkatan produktivitas, dan dari segi kuantitas, seperti proporsi program yang berhasil. Keempat, harus ada keterlibatan aktif dalam proses penilaian, dengan mengacu pada pelaksanaan acara yang komprehensif dan pengetahuan sukses terkait dengan perencanaan dan pencegahan kegagalan.

### **Konsep Akuntabilitas**

Menurut Forum Administrasi Nasional Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000:12), tugas pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk memberikan informasi tentang, atau menjawab pertanyaan tentang, kinerja unit individu organisasi atau pimpinannya kepada mereka yang memiliki Akuntabilitas juga dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab untuk memberikan informasi tentang atau menjawab pertanyaan tentang kinerja unit, individu, organisasi, atau pimpinannya. Akuntabilitas dan keterbukaan, seperti dijelaskan oleh Sulistiyani (2004), adalah dua prinsip dasar yang mendasari administrasi yang efisien baik di sektor publik maupun swasta. Disebutkan pula bahwa perlunya mengungkapkan dan melaporkan segala tindakan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, termasuk dalam gagasan akuntabilitas. Persyaratan ini termasuk dalam pengertian akuntabilitas.

Menurut Sulistiyani (2001) Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa dan pengelolaannya antara lain:

- a. Dalam proses perencanaan akan dilakukan pembentukan Tim Pelaksana;

- b. Strategi Penyaluran Dana Kota dan Bagaimana Dana Itu Dibelanjakan Pembagian sumber daya desa berdasarkan kepentingan relatif dari sekian banyak kebutuhan untuk pembangunan desa;
- c. Proses penyaluran sebagian Alokasi Dana Desa kepada masing-masing Pengelola sesuai dengan jabatannya;
- d. Penatausahaan Dana Desa Pengalokasian dana memerlukan ketaatan pada jadwal, peningkatan efisiensi, verifikasi kepraktisan situasi keuangan, dan ketaatan pada prosedur administrasi akuntansi;
- e. Setiap proyek fisik yang didanai oleh VFA harus terlebih dahulu diumumkan secara terbuka melalui papan nama proyek dan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh kepala desa kepada LPMD, yang kemudian bertindak sebagai pelaksana proyek. Hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan VFA yang menyatakan bahwa LPMD akan bertindak sebagai pelaksana proyek.
- f. Dalam hal terdapat permasalahan Alokasi Dana Desa, Tim Asistensi Kabupaten dapat memberikan bantuan penyelesaian permasalahan tersebut dalam kondisi tertentu:
  1. Memberitahukan kepada Tim Pengelola Sarana Kabupaten setiap ada kejadian yang menyangkut penyimpanan dan penggunaan uang Alokasi Dana Desa.
  2. Jika penelitian awal mengungkapkan bahwa Alokasi Dana Desa telah dicuri atau digunakan secara tidak tepat, pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan sesuai dengan kriteria yang relevan yang ditetapkan oleh Panitia Pengawas Fungsional.

### **Konsep Pengelolaan**

Mengutip dari pernyataan Waluyo (2007) bahwa manajemen adalah proses merencanakan dan mengatur organisasi, mengerahkan kepemimpinan, dan memotivasi anggotanya untuk menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dia mendefinisikan manajemen sebagai "proses perencanaan dan pengorganisasian organisasi." Istilah "manajemen" paling tepat diartikan sebagai mengacu pada proses yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semua eksekutif perusahaan, terlepas dari keahlian khusus yang mereka miliki, mengambil bagian dalam kegiatan yang berkontribusi terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan. Menggunakan informasi yang disajikan di atas, Fayol D. Siagian menunjukkan bahwa ada lima macam fungsi manajemen. , yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pemberi komando
- d. Pengkoordinasian
- e. pengawasan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, "manajemen" yang mengacu pada kumpulan tindakan yang terdiri dari perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan tujuan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi serangkaian tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan ini didasarkan pada bukti yang ditunjukkan sebelumnya dalam paragraf ini.

## **Transformasi Pembangunan Desa Tuban Menuju Desa berdikari**

Nugroho dan Rochim dalam bukunya yang berjudul *Pembangunan Wilayah. Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, mengemukakan bahwa transformasi pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan yang berorientasi pada pemecahan masalah dan peningkatan struktur dari sektor sosial, ekonomi dan ekologi untuk menuju desa mandiri.

Kepemimpinan Desa Tuban menggunakan empat strategi pengelolaan yang berbeda untuk menjadikan masyarakat desa mandiri. Strategi pertama adalah mengevaluasi dan mengembangkan seluruh potensi desa dan jaringan pasarnya untuk memastikan bahwa mereka dapat dikelola sebagai ekonomi lokal dan masyarakat. Jelas bahwa Desa Tuban memiliki banyak potensi yang belum tergarap, khususnya di bidang pertanian dan industri. Desa Tuban yang terletak di bagian barat Kabupaten Karanganyar berperan sebagai pembatas antara kobold Sragen, Boyolali, dan Surakarta yang letaknya berdekatan. Pemerintah memandang perolehan kekuasaan sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, yang memotivasinya untuk mencari kekuasaan terlebih dahulu. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi sebagai konsekuensi dari pemanfaatan potensi secara maksimal yang berujung pada berdirinya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Pemerintah Kota Tuban telah melaksanakan rencana untuk meningkatkan keamanan warga kota dengan mewajibkan BUMDes didirikan di setiap dusun. Ini berkontribusi pada kepercayaan dan kesejahteraan orang-orang di daerah sekitarnya, yang merupakan manfaat yang signifikan. BUMDes terdiri dari total lima desa, dan salah satunya bernama Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo.

## **METODE PENELITIAN**

Sebagaimana yang telah di uraikan dalam pendahuluan, bahwa teori yang relevan dalam penelitian ini adalah Good Governance dimana Hetifah Sj.Sumarto menyatakana bahwa “salah satu karakteristik dari good governance atau pemerintahan yang baik adalah partisipas. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam perjalanan penelitian ini, metodologi logis-deduktif digunakan. Studi yang tujuan utamanya bukan untuk menguji hipotesis melainkan untuk mencirikan ada atau tidaknya suatu variabel, peristiwa, atau kondisi disebut sebagai "penelitian deskriptif" oleh Suharsimi Arikunto (2003). Definisi frase "penelitian deskriptif" ini diberikan oleh Arikunto. Teknik di balik penelitian ini diambil dari sudut pandang kualitatif. Lingkup geografis studi ini terbatas pada desa Desa Tuban yang terletak di kecamatan Gondang Rejo Kabupaten Karanganyarr. Perkembangan yang lesu yang terlihat di sana disebabkan oleh manajemen keuangan yang buruk. Partisipan dalam penelitian adalah anggota masyarakat setempat di lokasi penelitian; mereka berjumlah sekitar lima orang dan terdiri dari penduduk pedesaan dan pemimpin masyarakat setempat. Teknik snowball sampling digunakan untuk memilih informasi yang relevan. Di sisi lain, saat menggunakan teknik ini, peneliti mencari data yang kredibel dengan mempertanyakan berbagai sumber dengan harapan akan mengarah pada temuan yang mereka butuhkan untuk menyelidikan mereka. Metode pengumpulan data meliputi (1) pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengukur partisipasi masyarakat; (2) wawancara mendalam dengan anggota masyarakat dan kepala desa dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terbuka dan fokus untuk mendapatkan jawaban yang rinci; dan (3) penggunaan sumber sekunder yang ada untuk mengisi kekosongan data primer. Observasi

langsung di lokasi penelitian untuk mengukur partisipasi lokal dan data diperoleh kurang lebih selama 2 bulan ( Januari – Februari 2023). Wawancara mendalam dengan anggota masyarakat dan kepala desa. Teknis analisis data Ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data, yang meliputi visualisasi, agregasi, dan investigasi informasi yang didasarkan pada wawancara dan observasi lapangan. Sebelum data dapat dievaluasi, peneliti perlu mendiskusikannya, menyempurnakannya, dan menulis ulang karena format yang diterima oleh peneliti seringkali tidak sesuai. informasi dari jenis kuantitatif yang harus diringkas dan diatur sesuai dengan kategori yang sudah ada. Bahkan dalam pemeriksaan data kuantitatif, penulis memberikan makna pada pengalamannya di lapangan dengan mengandalkan ide-ide yang telah mapan sebelumnya. Mereka kemudian menginterpretasikan temuan dalam terang pandangan dunia mereka sendiri.

## HASIL PENELITIAN

### Kondisi daerah Desa

Aturan Pendapatan Belanja daerah Desa Tuban intinya ialah hukum dasar atau hakekat makna asal aturan yang wajib diikuti supaya amanat yg diberikan sang masyarakat dapat dicapai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga pada umumnya. Desa Tuban Kecamatan Gondang Rejo ialah salah satu wilayah yg mempunyai luas 278.3025 Ha. Adapun batas-batas daerah di Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo secara geografis yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Sragen  
Sebelah Selatan : Desa Bulurejo  
Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali  
Sebelah Timur : Desa Dayu

Tabel 1. Struktur Organisasi Desa Tuban, Kec. Godangrejo



Visi Misi Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo

Visi Desa Tuban:

” Terciptanya masyarakat yg Adil, Makmur serta Sejahtera dan Berahklak Mulia”

Misi-misi secara umum Desa tuban:

1. Penguatan gerombolan ekonomi produktif rakyat menggunakan memperkokoh kelembagaan, meningkatkan kualitas produk, menyebarkan perjuangan, penajaman taktik pemasaran dan pengasahan asal Daya insan
2. Menyampaikan donasi sosial atau santunan pada warga miskin absolut baik pada bidang ekonomi, sosial, pendidikan juga kesehatan.
3. Menyampaikan pelayanan kepada warga secara cepat, seksama, dan transparan dengan memangkas alur birokrasi yg tidak efektif.
4. Mendorong pola pendidikan yang berbasis di ketrampilan simpel sehingga siap menghasilkan Sumberdaya manusia yang handal dan mumpuni.
5. Mendorong terciptanya langkah-langkah inovatif dalam pengembangan pertanian serta peternakan.
6. Menumbuhkan pola hidup yg harmoni antar pemeluk agama.

## PEMBAHASAN

Kepala Desa Tuban mengumumkan bahwa desa tersebut telah diberikan Alokasi Dana Desa untuk tahun kalender 2014, sebagaimana ditunjukkan dari informasi yang dihimpun dari sumber yang dapat dipercaya. Pemerintah Desa telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui inisiatif penjangkauan kecamatan, seperti menyampaikan keluhan masyarakat dan mengatur debat jumlah Alokasi Dana Desa atau memasang poster organisasi tersebut di jalan-jalan umum. Selain itu, Pemerintah Desa telah membahas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Terlihat bahwa Alokasi Dana Desa yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini telah dimanfaatkan dengan baik, terlihat dari pembangunan badan jalan dan pengaspalan infrastruktur satu kampung beton. Hal ini dapat dilihat di Kadus Tuban Kulon, yang telah mencapai batas 100% untuk penyelesaian; Kadus Tuban Kidul, yang juga sudah mencapai 100%; dan Kadus Gondangrejo Lor, yang juga sudah mencapai 100%. Selain itu, hal ini terlihat dari mayoritas penduduk yang telah menyetujui PKK, UMKM, dan kegiatan ekonomi. Dalam situasi tersebut, secara operasional, Alokasi Dana Desa holistik digunakan 30% untuk belanja pegawai, tunjangan BPD, uang pensiun BPD, tunjangan LKMD, tunjangan kades, dan 70% untuk pemberdayaan rakyat. Karena alokasi Dana Desa sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui musrenbangdes, maka setiap kebutuhan masyarakat dan setiap proyek pembangunan desa dapat dilakukan melalui Alokasi Dana Desa. Hal ini dimungkinkan berkat adanya Alokasi Dana Desa. Hal ini membuat masyarakat menduga bahwa Alokasi Dana Desa yang terdapat di Desa Tuban sudah mulai menginstruksikan masyarakat setempat. Selain itu, warga Desa Tuban dilibatkan dalam proses perencanaan melalui proses awal yang dilakukan dengan bantuan Musyawarah Dusun (musdus). Dalam organisasi ini, masyarakat diberi insentif untuk mengangkat isu-isu baru, dan tidak menutup kemungkinan masyarakat akan terdorong untuk memberikan usulan segera setelah Musyawarah Dusun berlangsung. Menurut Kepala Desa Tuban, saat ini masyarakat sudah menggunakan Alokasi Dana Desa yang bebas risiko. Terbukti dengan kegiatan yang ada, baik fisik maupun non fisik, tidak dapat dilepaskan asal kiprah atau rakyat. Sangat penting bagi setiap orang untuk meningkatkan rasa penentuan nasib sendiri dan memikul tanggung jawab

untuk pemeliharaan infrastruktur fisik komunitas tanpa perlu paksaan dari sumber luar jika tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan warga. Karena itu, Alokasi Dana Desa mudah diakses, dan juga mampu memenuhi kebutuhan mereka untuk mempercepat proses pembangunan.

Menurut laporan warga setempat, pembagian uang oleh Pemerintah Kabupaten didasari oleh kurangnya inisiatif warga dalam mendukung pemanfaatan sistem gotong royong. Ini adalah kesimpulan yang dicapai oleh warga. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam APBDes dilakukan secara terbuka, yang memungkinkan penduduk perdesaan memiliki pemahaman implisit pemerintahan yang ada di masyarakatnya. Bersama-sama, pemerintah Desa dan Lembaga Lembaga bekerja untuk mengembangkan infrastruktur fisik negara melalui cara-cara yang inovatif. Sejak pelaksanaannya, masyarakat melaporkan bahwa Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan secara efisien untuk tujuan operasional pemerintah desa sesuai dengan kondisi yang relevan. Informasi ini berasal dari masyarakat laporan. Dalam sebuah laporan yang disusun oleh kepala desa dan warga desa, disajikan secara komprehensif peran dan tugas individu yang terlibat dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa. Fakta bahwa keterlibatan masyarakat berhasil dapat dilihat sebagai bukti bahwa individu terlibat selama proses perencanaan. Langkah pertama dalam proses perencanaan adalah mengumpulkan berbagai masukan dari anggota masyarakat di musyawarah RT, kadus, dan pusat desa. Raka'id melakukan musyawarah, aspirasi pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap aplikasi Alokasi Dana Desa yang melibatkan warga yang terlibat, BPD, perangkat desa, dan semua unsur desa. Fakta bahwa kebutuhan masyarakat umum telah terpenuhi dan jumlah tindakan kriminal telah berkurang, keduanya berkontribusi pada peningkatan taraf hidup penduduk pedesaan. Meningkatnya taraf hidup masyarakat pedesaan tidak hanya terkait dengan keberadaan Alokasi Dana Desa; itu juga disebabkan fakta bahwa ada lebih sedikit kegiatan kriminal. Setelah mendapatkan bantuan yang bermanfaat, anggota komunitas Muslim di Desa Tuban melaporkan bahwa tingkat stres mereka berkurang. Sejak awal, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan dana Alokasi Desa. Salah satu tantangan ini adalah fakta bahwa dana ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus meningkat. Koordinasi dan komunikasi yang solid antara pemerintah daerah dan masyarakat, transparansi mengenai pengeluaran pemerintah daerah untuk laporan Alokasi Dana Desa, dan sinergi antara keinginan warga dan tujuan program merupakan contoh karakteristik masyarakat yang mendukung. Lingkungan keluarga adalah lingkungan politik, sosial, dan budaya yang memungkinkan dan memupuk pembentukan dan pengembangan prakarsa, gagasan, individualitas, kolektivisme, dan gerombola. Ini karena ia menciptakan kondisi yang memungkinkan hal-hal ini tumbuh dan berkembang. Karena itu, peran pemerintah baik pusat maupun daerah adalah merencanakan dan melaksanakan acara Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan perdesaan melalui pemberian sumbangan baik sumber daya material maupun teknis yang berada di luar kemampuan keuangan daerah. masyarakat lokal dan organisasi non-pemerintah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk pembangunan pedesaan; ini terutama terjadi pada penduduk yang berpendidikan tinggi dan sensitif secara ekologis. Informasi tentang Alokasi Dana Desa yang secara tidak sengaja dibocorkan kepada masyarakat luas bermanfaat bagi masyarakat dalam berbagai hal, antara lain sebagai berikut: a) Masyarakat dapat menghemat biaya pembangunan infrastrukturnya karena mampu memikul tanggung jawab atas prakarsa pembangunannya sendiri dan mengelola hasil upaya tersebut dengan tepat. Menurut Aris Santoso, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pengelolaan uang desa dengan memilih cara pembagiannya, memiliki akses terhadap uang tersebut, dan mengikuti kegiatan tambahan Alokasi Dana Desa. Hak ini datang dengan tanggung jawab pemungutan suara tentang bagaimana dana harus



dialokasikan. Namun, karena semangat keagamaan masyarakat umum yang meningkat, maka peristiwa hari ini ditetapkan sebagai swadaya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa perlu diintegrasikan ke dalam pengelolaan APBDes. Hal ini diperlukan agar prinsip-prinsip yang mengatur pengelolaan Alokasi Dana Desa identik dengan yang mengatur pengelolaan APBDes yang harus berpegang pada prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (a) Partisipasi, yang mengacu pada proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang melibatkan banyak pihak mulai dari tahap perencanaan dan pengambilan keputusan hingga pengawasan wajib dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa perlu diintegrasikan dalam pengelolaan APBDes. Hal ini diperlukan agar prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa identik dengan prinsip pengelolaan APBDes yang pada gilirannya harus berpegang pada prinsip good governance. Prinsip-prinsip tersebut meliputi (a) Partisipasi, yang mengacu pada proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang melibatkan banyak pihak dan mencakup segala hal mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan hingga kewajiban pengawasan dan penilaian. melambangkan gagasan bahwa penduduk biasa, seperti petani, desa, anggota UMKM, dan jenis masyarakat lainnya, perlu dilibatkan dalam proses pengaturan Alokasi Dana Desa; tidak cukup hanya melibatkan elit dalam proses ini. Besar kecilnya keterlibatan masyarakat setempat selalu dijadikan tolok ukur untuk menilai seberapa sukses Alokasi Dana Desa. Tanpa dukungan dari masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, prakarsa tersebut tidak akan dapat dilaksanakan sepenuhnya dan juga tidak akan bermanfaat. (b) Transparansi; semua pemangku kepentingan yang terlibat diberi wawasan tak terbatas ke dalam keseluruhan proses. Selain itu, Proses-proses diterapkan untuk menjamin bahwa penduduk pedesaan mengetahui kegiatan-kegiatan yang didukung oleh uang-uang ini, serta tujuan, target, hasil, dan manfaat yang terkait dengan setiap kegiatan tersebut. Di tempat-tempat umum dipasang poster-poster yang memuat informasi kegiatan dan acara yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa serta tanggung jawab SPJ atas pendanaan tersebut. Informasi ini disebarluaskan melalui Musrenbangdes. Pemerintah Desa telah menerapkan budaya keterbukaan dan transparansi dalam berhubungan dengan masyarakat. Orang-orang sadar akan budaya ini berkat poster-posternya. dan (c) proses adopsi oleh Alokasi Dana Desa yang dapat diaudit dan menyeluruh mulai dari tujuan yang dimaksudkan, dengan tanggung jawab mulai dari implementasi hingga penyelesaian untuk semua pihak yang terlibat, termasuk penduduk pedesaan di masa depan; ini akan menjadi persyaratan agar ADD dianggap layak.

## KESIMPULAN

Berikut ini dapat disimpulkan dari kutipan yang telah disajikan sejauh ini. (1) Tingkat keterlibatan mereka yang tinggal di Desa Tuban dapat dinilai sepanjang waktu dengan perencanaan yang matang, implementasi yang efektif, dan pemantauan situasi yang cermat. Ada banyak variabel yang berkontribusi terhadap perkembangan Desa Tuban, namun ada juga beberapa yang menghambat. Untuk mengendalikan alokasi keuangan daerah, antara lain meliputi: (a) bantuan dari pemerintah provinsi dan kota, serta komunikasi dan koordinasi yang baik antar tingkat pemerintahan tersebut. Sebagai akibat langsung dari hal ini, laju pertumbuhan di wilayah ini agak meningkat. Berdasarkan informasi di atas, maka diajukan beberapa hal sebagai berikut: (1) Pemanfaatan Alokasi Dana Desa hendaknya tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik semata karena masih banyak aspek lain yang perlu menjadi perhatian semua pihak; Dua warga setempat dengan sukarela membantu membuat SPJ karena ada sejumlah orang berkemampuan tinggi di pedesaan yang memiliki landasan pendidikan yang kuat dan kebebasan untuk bertindak secara mandiri selama proses penulisan laporan. Ketiga, menaikkan anggaran tahunan Alokasi Desa karena sangat bermanfaat bagi

pertumbuhan dan perkembangan desa; (4) mewajibkan mereka yang berpartisipasi dalam pengelolaan uang jatah Kas Daerah untuk diperiksa oleh Pemerintah Kabupaten.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta:
- Subroto, Agus (2009) *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*Diakses pada 23 Januari 2023, dari <http://eprints.undip.ac.id/24290/>
- Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial di dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hetifah Sj. Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi serta Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris serta Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muslimin, Mappamiring, dan St. Nurmaeta. (2012). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa*
- Naimah. (2017). *Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara Vol. 2, No. 4, Hal. 93- 106, dari <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/638>
- Rahardjo Adisasmita. (2006). *membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- RI, L.A.N.(1999).*Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Lembaga Administarsi Negara RI, Jakarta.
- Rochim, Nugraha, *Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan OTONOMI DAERAH*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2005.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004), *Kemitraan serta model-model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta.
- Suharsimi, Arikunto. 2003. *Manajemen Penelitian*. Cet. Ke-IV. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. CV. Mandar Maju